

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. SEJARAH PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

1. Sejarah Berdirinya GOLKAR

Semangat kekaryaan yang terwujud dalam bentuk pengakuan terhadap Golongan Karya bibitnya telah tumbuh ketika pembahasan penyusunan UUD 1945 sedang dilakukan. Namun, kedudukan secara formal belum diatur dengan tegas pada awal kemerdekaan, hingga keluarnya Maklumat Wakil Presiden.

Pada tanggal 16 Oktober 1945 keluar maklumat Wakil Presiden Nomor X, yang disusul kemudian dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang member kesempatan mendirikan partai-partai politik dengan idiologi yang beraneka ragam.

Kehidupan politik dalam sistem multi partai tersebut berlangsung sampai tahun 1957 dalam zaman yang dikenal dengan sebutan zaman demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Dalam zaman ini kendali percaturan politik berada ditangan partai politik. Kendati Pemilu 1955 telah dilaksanakan namun tidak ada satupun partai politik yang cukup dominan mengendalikan parlemen maupun pemerintah. Keadaan demikian, mendorong setiap cabinet berbentuk cabinet koalisi secara silih berganti.

Dalam suasana demikian antara tahun 1950-1957 tidak kurang enam cabinet silih berganti. Setiap cabinet baru melahirkan program baru. Program

cabinet lama ada yang diteruskan tetapi lebih banyak yang dibatalkan, Karena tidak sesuai dengan program partai politik yang berkuasa.

Akibatnya banyak program yang sedang dalam pelaksanaannya menjadi terlantar dan menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit. Pemerintah selalu ragu-ragu untuk melaksanakan programnya, karena selalu dihantui oleh seringnya pergantian cabinet dalam waktu relative singkat. Sejarah telah mencatat bahwa umur cabinet pada zaman demokrasi parlementer tersebut rata-rata kurang dari satu tahun. Oleh sebab itu dapatlah dimengerti, bahwa tidak satupun cabinet dapat melaksanakan pembangunan, karena setiap cabinet tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bekerja.

Sementara itu pemberontakan bersenjata dan tuntutan daerah terhadap pemerintah pusat makin meluas, seperti pemberontakan DI-TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan serta pemberontakan PRRI atau PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi. Ketidakstabilan politik dan keamanan dan tidak terjaminnya keselamatan mendorong TNI mengambil pemberlakuan Undang-Undang keadaan bahaya pada tahun 1957.

Dalam usaha pemulihan keamanan tidak dapat dipulihkan dengan kekuatan senjata saja, karena gangguan keamanan itu berlatar belakang sosial politik. Salah satu langkah yang diambil oleh TNI adalah penggalangan golongan fungsional dengan maksud agar golongan tersebut dapat diajak turut dalam usaha pemulihan keamanan. Sebagai wadah kerjasama dibentuklah berbagai badan kerjasama sipil-militer, seperti badan Kerjasama

Buruh Militer, Badan Kerjasama Tani Militer, Badan Kerjasama Pemuda Militer, Badan Kerjasama Wanita Militer, dan Badan Kerjasama Ulama Militer.

Apresiasi TNI kepada golongan fungsional untuk bekerja sama mendapat sambutan positif dari golongan fungsional yang tidak berafiliasi kepada suatu partai politik. Mereka merasa bahwa badan kerjasama yang dibentuk TNI itu adalah wadah perjuangan yang tepat untuk melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

Puncak pertentangan partai-partai politik dalam masa demokrasi parlementer adalah kegagalan konstituante dalam menetapkan Dasar Negara pada tahun 1959. Pertentangan tersebut berpusat pada adanya partai politik yang dengan gigih mempertahankan pula menghendaki dan memperjuangkan syariat Islam sebagai Dasar Negara. Karena tidak adanya kesepakatan, maka diadakanlah pemungutan suara sampai tiga kali, tetapi masing-masing kelompok partai politik yang berbeda pendapat itu tidak mampu mengumpulkan 2/3 suara yang diperlukan. Walaupun pendukung Pancasila lebih besar dibandingkan dengan pendukung syariat Islam, tetapi pendukung ideologi Pancasila tidak berhasil mengumpulkan 2/3 suara yang diperlukan.

Untuk menyelamatkan bangsa dan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945, yang

Dengan berlakunya kembali UUD 1945 maka mulailah dirintis penyederhanaan partai politik. Pada permulaan tahun 1961 hanya diakui 90 partai politik. Tetapi walaupun jumlah partai politik telah berkurang, ternyata tidak mengurangi pertentangan ideologi di dalam masyarakat malahan itu makin meruncing. Hal ini disebabkan adanya format politik NASAKOM (nasionalis, Agama, Komunis) yang digagas oleh Soekarno. PKI yang menjadi tulang punggung struktur politik NASAKOM itu menuntut agar semua lembaga fungsional “diNASAKOMkan”. PKI sebagai tulang punggung utama politik NASAKOM menjadi semakin dominan dalam pencatatan politik nasional. Untuk menghadapi ancaman PKI, maka didirikanlah SOKSI, KOSGORO, dan MKGR.

Sebagai perlawanan terhadap tekanan PKI dan dalam rangka pelaksanaan UUD 1945, maka golongan fungsional dan dengan dukungan TNI berjuang keras untuk memformalkan kehadirannya didalam masyarakat. Melalui perjuangan yang ulet dan terus menerus dari golongan fungsional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1959, diangkatlah 200 orang, wakil Golongan Karya di MPRS. Kemudian dengan keputusan Presiden Nomor 193 tahun 1964 diakuihlah wakil-wakil Golongan Karya di Front Nasional.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan front Nasional, maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya yang diingkat dengan

Sebutan SEKBER GOLKAR, pada tanggal 20 Oktober 1964. Tanggal inilah yang merupakan hari lahirnya GOLKAR yang diperingati setiap tahun.

Setelah meletus peristiwa G. 30 S/ PKI, maka TNI, SEKBER GOLKAR, Pemuda, mahasiswa, dan rakyat yang Pancasila bangkit dengan serentak menumpas gerakan penghianatan G30S/PKI waktu itu dapat ditumpas habis.

Pada masa awal pertumbuhannya, SEKBER GOLKAR beranggotakan 61 organisasi fungsional, kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional karena golongan fungsional lainnya sudah menyadari bahwa SEKBER GOLKAR berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta tujuan dan haluan adalah demokrasi Pancasila untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kearyannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan

Sementara itu proses kristalisasi dalam tubuh SEKBER GOLKAR berjalan terus, dengan didirikannya PARMUSI pada tahun 1968, maka sejumlah organisasi melepaskan diri dari SEKBER GOLKAR. Sementara itu dibentuklah KINO-KINO (Kelompok Induk Organisasi) sebagai pengelompokan dari organisasi-organisasi yang bergabung dalam SEKBER GOLKAR. Proses kristalisasi ini berlanjut lagi dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1969 yang pada waktu itu terkenal dengan sebutan PERMEN 12.

Dalam keadaan yang telah terkristalisasi demikian, SEKBER GOLKAR memasuki Pemilu 1971. Ternyata rakyat memberikan kepercayaan kepada SEKBER GOLKAR, SEKBER GOLKAR meraih 62, 79 % suara pemilih.

Setelah meraih kemenangan dalam Pemilu 1971, maka sesuai dengan ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 SEKBER GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR. Namun ternyata perubahan menjadi partai politik adalah sesuatu yang sangat baru bagi Golkar. Kalau meruntut perjalanan masa lalunya, Golkar sangat trauma terhadap kehidupan partai politik.

Hadirnya Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar dalam panggung politik justru dimaksudkan sebagai antitesa perilaku buruk kepartaian masa itu. Dalam konteks itulah, maka Golkar masa Orde Baru tidak pernah mau mengubah sebagai partai politik meskipun fungsi sebagai partai diilankan

Namun sejarah kini mencatat, Golkar dapat berubah menjadi partai politik. Perubahan ini menandakan bahwa telah terjadi perubahan generasi yang sangat besar dalam tubuh Golkar. Dari mereka yang anti kepartaian kepada generasi baru yang justru sangat akrab dengan sistem kepartaian.⁵⁸

Jelaslah bahwa lahirnya GOLKAR adalah merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi suasana kehidupan politik yang penuh dengan pertentangan politik diantara partai politik karena adanya pengotak-kotakan dan fanatisme golongan yang sempit yang sangat membahayakan persatuan dan keastuan bangsa.

Ditinjau dari proses konsolidasinya, maka partai GOLKAR adalah wadah bagi setiap warga negara Indonesia yang mempunyai persamaan kehendak dan cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkesinambungan antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar inilah, maka anggaran dasar GOLKAR menegaskan, bahwa GOLKAR berorientasi pada program pembangunan tanpa membedakan latar belakang ras, suku, asal usul, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

⁵⁸ Novianto, Alfian M, Asnan, *Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi*, (Jakarta: Sejati-Press, 2004), hal.61

2. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Partai GOLKAR

Provinsi D. I. Yogyakarta

Paige Johnson Tan memberikan definisi tentang partai politik, menurutnya partai politik yakni kelompok apa saja yang ikut serta dalam pemilu dan mampu menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan publik.⁵⁹

Awal berdirinya partai GOLKAR di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat ditampikkan dari pagar dinamika politik pada level pusat. Meskipun dalam paradigma barunya partai GOLKAR sekarang ini mengaku menyebut dirinya sebagai Partai yang demokratis, moderat, yang berakar dan terpisah dari pemerintah, akan tetapi pada dasarnya kehadiran Partai GOLKAR saat ini secara formal merupakan keberlangsungan yang tertuang dalam AD/ART Partai GOLKAR. Terbentuknya partai GOLKAR dapat dimaknai sebagai keinginan rezim yang berkuasa guna mempersiapkan para anggotanya sebagai mesin politik.

Partai GOLKAR berupaya menjadikan partai ini sebagai partai yang benar-benar menagunut makna sistem politik pasca reformasi. Dimana Partai GOLKAR tidak hanya harus menjaga jarak dengan pemerintah tetapi juga hendak mengahpus stigma sejarah yang melekat di diri partai GOLKAR. Partai GOLKAR berusaha untuk menjadai partai dalam makna yang sebenarnya, yang mengaspirasikan kepentingan masyarakat serta berbuat kepentingan masyarakat, tidak lagi sekedar partai yang merupakan

⁵⁹ Paige Jhohnson Tan, *"Political Parties And The Consolidation Of Democracy In Indonesia"*, Working Paper, Departement Of Political Science, University Of North Carolina, Wilmington, Tanpa Tahun, Hal 6

perpanjangan tangan pemerintah untuk melegalkan segala cara untuk legitimasi kekuasaan. Hal ini dibuktikan dengan tetap bersikap kritis dalam menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam semua level implementasi.

Partai GOLKAR secara maksimal berupaya secara mandiri dalam pengambilan keputusan, pengendalian seluruh proses dan dinamika organisasi dengan menghilangkan struktur Dewan Pembina yang terdahulu merupakan salah satu alat rezim untuk mengendalikan GOLKAR. Partai GOLKAR akan terus menunjukkan eksistensinya dalam koridor fungsi partai yang sesungguhnya walaupun partai GOLKAR secara organisatoris serta kelembagaannya merupakan rancangan pemerintah sebagai mesin politik.

Maka dapat ditarik benang merah bahwa sebagaimana ditingkat pusat, kelahiran dan pertumbuhan GOLKAR di Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata tidak menunjukkan bahwa partai GOLKAR terinstitusional.

B. PARADIGMA DAN DOKTRIN PERJUANGAN

1. Paradigma dan Doktrin Perjuangan

Paradigma baru Partai GOLKAR ini berisi pokok-pokok doktrin, visi, misi, dan platform politik. Di dalam perumusan paradigma baru ini ada terkandung aspek pembaruan sekaligus kesinambungan. Aspek pembaruan ditunjukkan melalui perubahan struktur atau kelembagaan, dan aspek kesinambungan tampak pada kekukuhan Partai GOLKAR untuk tetap berideologi Pancasila dan doktrin karya kekaryaan. Perubahan-perubahan di atas selanjutnya diformulasikan dalam suatu paham baru Golkar yang

disebut dengan “Paradigma Baru Partai Golkar”. Oleh Golkar, maksud dari paradigma baru adalah sebagai berikut :⁶⁰

Pembaruan ini disamping dimaksudkan untuk meluruskan sejumlah kekeliruan lama, juga diarahkan untuk mewujudkan Partai GOLKAR yang mandirian, demokratis, kuat, solid, berakar dan responsif. Dengan paradigma baru maka Partai GOLKAR diharapkan menjadi Partai politik yang modern dalam pengertiannya yang sebenarnya. Yakni, tidak lagi sebagai “Partainya penguasa” (the ruler’s party) yang hanya menjadi mesin pemilu atau alat politik untuk melegitimasi kekuasaan sebagaimana dalam paradigma lama.

Ada dua hal penting dari gagasan tersebut di atas yaitu :

Pertama, keinginan untuk memutus hubungan dengan masa Orde Baru. Hal itu tercermin dalam outokritiknya dengan menyebut peran masa lalu Golkar sebagai mesin politik dan “partainya penguasa”. Golkar nampaknya menyadari bahwa pada masa Orde Baru, organisasi ini hanya dijadikan alat legitimasi penguasa. Munculnya otokritik seperti ini dalam dokumen resmi menandakan bahwa Golkar sungguh-sungguh hendak mengubah diri, memutar haluan atau orientasi secara drastis.

Kedua, dokumen resmi itu pula menyebutkan obsesi Golkar untuk menjadi partai politik yang modern dalam pengertian yang sesungguhnya.⁶¹

⁶⁰ Akbar Tandjung, *Demokratisasi Sebagai Kata Kunci Memperkuat Integrasi Nasional*, (Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Indonesia Baru dengan tema “Reformulasi Format Baru Pemerintahan Nasional Dalam Rangka Mempertahankan Berkatnya Indonesia”), Jakarta, 21

Partai moderen itu kurang lebih didefinisikan sebagai partai yang “mandiri, demokratis, kuat, solid, berakar dan responsif”. Lebih tegasnya, kemandirian itu diwujudkan secara internal dalam bentuk mengimplementasikan secara ketat prinsip “kedaulatan di tangan anggota” dengan menyusun suatu mekanisme keputusan secara *bottom-up*. Sedangkan secara eksternal adalah tidak menggantungkan diri kepada penguasa atau pihak-pihak lainnya.⁶²

Pembaruan paradigma itu sendiri didorong oleh faktor utama yang berasal dari diri Partai GOLKAR sendiri, yakni jati diri dan watak GOLKAR sebagai kekuatan pembaru. Sebagaimana disebutkan pada poin keempat dari IKRAR PANCA BHAKTI GOLONGAN KARYA, etos atau semangat pembaruan pada sejatinya merupakan fitrah atau sikap dasar Partai GOLKAR sejak kelahirannya. Fitrah inilah yang mendorong dilakukannya pembaruan ini. Dengan demikian, pembaruan paradigma ini merupakan pengejawantahan belaka dari fitrah tersebut.

Paradigma baru Partai GOLKAR ini telah mulai diwujudkan melalui pembaruan internal, terutama terhadap struktur atau kelembagaan organisasi yang selama ini mempunyai akses yang terlalu besar terhadap organisasi yang membatasi kemandirian Partai GOLKAR.

⁶¹Dokumen yang dimaksud adalah AD/ART yang direvisi dalam Keputusan Musyawarah Nasional LuarBiasa yang pada saat itu Golkar sedang mengalami masa transisi menjadi Partai Politik yang kemudian pucukkepemimpinan Partai Golkar akhirnya jatuh ketangan Ir. H. Akbar Tandjung

⁶²... (text partially cut off)

Langkah-langkah pembaruan kelembagaan tersebut juga diikuti dengan diwujudkan prinsip kedaulatan ditangan anggota. Yaitu mekanisme pengambilan setiap keputusan organisasi dilakukan secara lebih terbuka, demokratis, dari bawah (bottom-up), dan dengan pemungutan suara secara langsung. Melalui mekanisme yang demokratis ini maka terbukalah peluang bagi kader-kader untuk memimpin Partai karena memang dalam perspektif demokrasi kesempatan dan peluang perlu disediakan untuk semua, sehingga tidak terjadi pemusatan pandangan pada pesona figur tunggal yang mengarah pada kultus individu.

Implikasi lain dari serangkaian pembaruan tersebut adalah sangat berarti, yakni Partai GOLKAR menjadi benar-benar mandiri dan mampu mewujudkan tegaknya asas kedaulatan ditangan anggota sebagai salah satu prinsip utama dari Partai yang modern, demokratis, dan mengakar. Partai GOLKAR bertumpu hanya pada kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kekuatan di luar dirinya, dan selanjutnya dapat mengambil keputusan-keputusan organisasional secara independen tanpa campur tangan dari pihak luar atau golongan manapun.

Dengan paradigma baru, doktrin Partai GOLKAR tetap sebagai kelanjutan dari Sekretariat Bersama (SEKBER) GOLONGAN KARYA yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1964.

Doktri Golongan Karya adalah kesatuan pemikiran Golongan Karya yang meliputi dasr-dasr pemikiran tentang Karya dan kekaryaan serta paham-paham pokok yang menyangkut pengembangan serta pelaksanaan

Karya dan Kekaryaannya tersebut secara nyata dalam perjuangan Golongan Karya. Doktrin partai GOLKAR merupakan pedoman, pengangan dan bimbingan dalam melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang-bidang sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik, pertahanan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya dalam Negara Republik Indonesia

Doktrin Golongan Karya memuat kesadaran akan nilai-nilai luhur serta cita-cita dan gagasan yang didukung, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh warga Golongan Karya dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah berdasarkan Pancasila. Dan Partai GOLKAR tetap berpegang pada doktrin karya kekaryaannya, yaitu Karya Siaga Gatra Praja, tetapi dipahami secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan jaman.

Dengan doktrin karya kekaryaannya maka Partai GOLKAR selalu melihat masyarakat dalam perspektif fungsi, bukan dalam perspektif ideologi, apalagi aliran. Pengelompokan masyarakat yang terbaik dalam perspektif Partai GOLKAR adalah pengelompokan berdasarkan peran dan fungsinya.

Dengan doktrin karya kekaryaannya Partai GOLKAR berorientasi pada program (program oriented) dan atau pemecahan masalah (problem solving), bukan berorientasi pada aliran atau ideologi (ideology oriented). Dengan perspektif ini ingin ditegaskan bahwa GOLKAR tidak sependapat dilakukannya pengelompokan politik berdasarkan primordialisme dan sektarianisme. Pembelahan masyarakat berdasarkan ideologi atau aliran-

aliran dikhawatirkan akan melahirkan konflik-konflik ideologi yang bermuara pada pertentangan, perpecahan, dan masalah disintegrasi bangsa.

Dengan orientasi ini maka masyarakat tidak akan terjebak dalam pertentangan atau konflik ideologi yang tidak perlu, melainkan berorientasi pada karya untuk membangun bangsa. Bagi Partai GOLKAR karya yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat adalah lebih penting daripada ide atau gagasan semata. Karya kekaryaannya adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis, dan menyeluruh, untuk mendatangkan manfaat bagi rakyat. Karya kekaryaannya adalah juga amal shalih dalam pengertian yang luas sebagaimana yang diajarkan agama-agama.

Oleh karena doktrin inilah Partai GOLKAR senantiasa prihatin menyaksikan kehidupan politik yang ditandai oleh maraknya persaingan tidak sehat di antara berbagai Partai politik yang membawa terjadinya konflik dan pertentangan politik yang tajam. Masing-masing Partai politik berusaha memobilisasi dukungan massa bagi kepentingan sempit, sehingga kepentingan bangsa yang lebih luas terabaikan. Sebagai akibat dari kecenderungan tersebut, Bangsa Indonesia kehilangan momentum untuk membangun diri guna mewujudkan cita-cita proklamasi.

Kegandrungan (euphoria) untuk menjadikan politik sebagai panglima kehidupan dan menekankan ideologi politik sektarianistik, seperti pada pengalaman lama, telah menghambat proses mensejahterakan rakyat. Sebagai akibatnya rakyat terjerembab ke dalam kemiskinan dan

keterbelakangan dalam suasana ketidakpastian politik. Dalam suasana seperti itulah Partai GOLKAR tampil dengan doktrin karya kekaryaannya karena tidak ingin bangsa ini terpecah ke dalam kotak-kotak sempit yang hanya akan mengancam keutuhan bangsa.

2. Ikrar

Ikrar adalah pernyataan sikap, janji yang sungguh-sungguh yang dilandasi kesadaran akan keyakinan, kebenaran dan kesanggupan untuk melaksanakan dan mengambil tanggung jawab.

Ikrar Partai Politik GOLKAR “Panca Bakti” adalah sebagai berikut :

- a. Kami, warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Kami, warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945, pembela serta pengamal Pancasila;
- c. Kami, warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan;
- d. Kami, warga Partai Golongan Karya bertekad bulat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib dan sentosa;
- e. Kami, warga Partai Golongan Karya setia pada UUD 1945 mengutamakan kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan dan pembangunan

modern, solid, dan mengakar, yang bercirikan pada siat mandiri, responsif, terbuka dan demokratis.

Dalam rangka mengaktualisasikan platform tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partai GOLKAR bukan hanya mengembangkan wawasan kebangsaan atau nasionalisme semata, melainkan juga mengutamakan upaya mewujudkan keadilan ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya bagi semua daerah. Perwujudan keadilan adalah bagian utama dari program perjuangan Partai GOLKAR untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partai GOLKAR akan terus berjuang untuk memberdayakan masyarakat di daerah di segala bidang; menghormati dan menghargai upaya-upaya pelestarian budaya lokal; mendorong otonomi daerah secara nyata; dilaksanakannya perimbangan keuangan pusat dan daerah; mengatasi segala bentuk konflik horizontal dan vertikal; dan mengatasi segala bentuk upaya pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memantapkan wawasan kebangsaan maka Partai GOLKAR berjuang untuk memperkokoh segenap potensi bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; memelopori segala upaya penguatan kesatuan dan persatuan; mengembangkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan; membangun citra bangsa yang positif di mata internasional; dan mencegah berkembangnya nasionalisme sempit.

Dalam rangka merealisasikan platform sebagai Partai terbuka dan majemuk Partai GOLKAR berjuang untuk mengembangkan dan

membudayakan wawasan keterbukaan (inklusifisme) dan kemajemukan (pluralisme) dalam tubuh Partai; mengakui dan menghargai kemajemukan latar belakang anggota; dan justru memandang kemajemukan sebagai potensi untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Partai GOLKAR juga memandang kemajemukan bangsa sebagai potensi sebagai mozaik ke-Indonesiaan yang justru memperkokoh integrasi bangsa. Dalam kaitan ini pula maka upaya untuk memperkokoh keberadaan Partai GOLKAR sebagai Partai kebangsaan terus ditingkatkan.

Dalam rangka mengembangkan demokrasi baik secara struktural maupun kultural maka Partai GOLKAR berjuang untuk terciptanya sistem dan format politik yang di dalamnya berjalan mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balance); mendorong terbukanya ruang partisipasi politik; memberdayakan lembaga-lembaga demokrasi; membangun kehidupan pers yang bebas yang ikut melaksanakan pendidikan politik bagi rakyat; dan mendorong partisipasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Sebagai Partai yang berwawasan kesejahteraan rakyat maka Partai GOLKAR berjuang untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, yakni sistem ekonomi yang yang berpihak pada usaha kecil, menengah, dan koperasi tanpa menafikan tumbuhnya sistem ekonomi konglomerasi yang tidak monopolistik; mengusahakan ketersediaan bahan kebutuhan pokok rakyat dengan harga yang serba terjangkau; mengurangi pengangguran

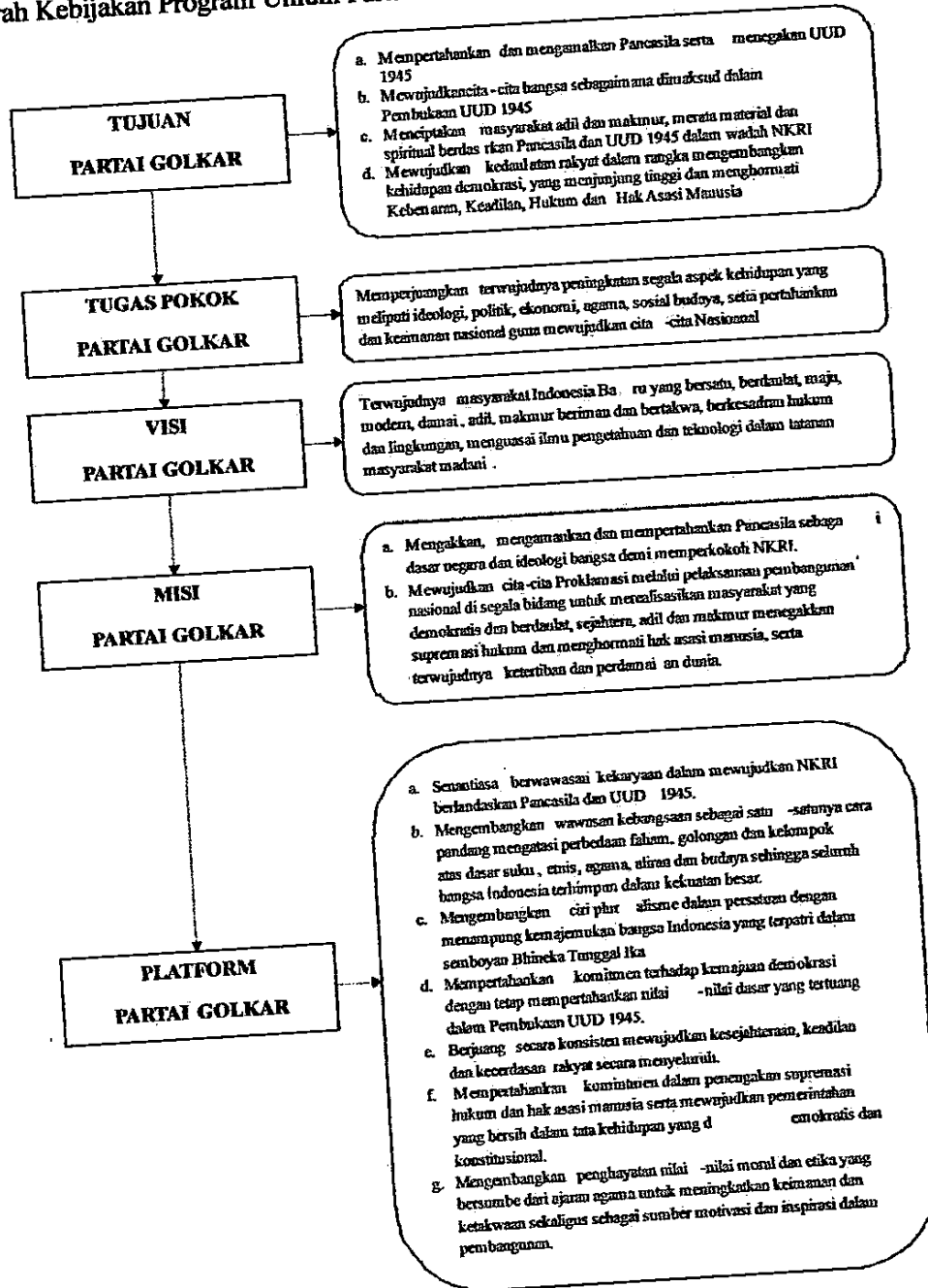
(UMR) yang memadai, dan jaminan kerja; serta meningkatkan akses ekonomi rakyat.

Untuk menciptakan supremasi hukum, keadilan dan tegaknya HAM maka Partai GOLKAR bertekad memberdayakan lembaga-lembaga peradilan, mengupayakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, serta terus memperbaiki produk-produk hukum yang bertentangan dengan demokrasi, hak asasi manusia dan rasa keadilan masyarakat.

Akhirnya, sebagai Partai yang menjunjung tinggi ajaran agama-agama dan memegang teguh etika dan moralitas agama, Partai GOLKAR dengan kesadaran penuh berusaha mendorong upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Partai GOLKAR berjuang untuk menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta terus membangun karakter bangsa berdasarkan ajaran agama.

Partai GOLKAR mendorong pengembangan kehidupan beragama. Pengembangan kehidupan beragama diarahkan pada terciptanya kesemarakkan kehidupan beragama baik secara lahiriah maupun batiniah, sekaligus terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama. Sebagai Partai yang menjunjung tinggi ajaran agama, Partai GOLKAR selalu mengajak umat beragama untuk menghindarkan diri dari kecenderungan politisasi agama, yakni menjadikan simbol-simbol keagamaan sebagai alat untuk tujuan-tujuan politik yang terbatas.

Gambar 2.1
Arah Kebijakan Program Umum Partai GOLKAR Provinsi D. I Yogyakarta⁶³



⁶³ Hasil Musyawarah Daerah VIII Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Daerah Istimewa Yogyakarta di Hotel Sahid Raya, Babarsari Yogyakarta, 30 November-1 Desember 2009

1. Tujuan Partai Golkar

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegaskan UUD 1945;
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945;
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan hak asasi manusia.

2. Tugas Pokok Partai Golkar

Tugas pokok partai GOLKAR adalah memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, ekonomi, agama, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional.

3. Visi

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (the founding fathers) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ikut mencaintakan

perdamaian dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai GOLKAR hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan.

Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistim kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai GOLKAR upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

Keterbukaan adalah nilai kemanusiaan hakiki yang merupakan napas dari gerakan reformasi. Atas dasar pandangan keterbukaan tersebut, kita harus mempertahankan sistim sosial politik yang terbuka atau transparan

dengan struktur dan proses politik yang dapat secara efektif benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Untuk itu maka peluang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses-proses politik mutlak dibuka seluas-luasnya. Kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat semakin terjamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Sendi utama masyarakat madani adalah supremasi hukum. Oleh karena Negara kita adalah Negara hukum maka supremasi hukum harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan sistim politik yang demokratis dan berdasarkan hukum. Partai GOLKAR memandang bahwa reformasi hukum tidak terbatas hanya pada penyempurnaan sarana dan prasarana, materi dan aparatur hukum, tetapi juga budaya hukum.

Di bidang ekonomi visi Partai GOLKAR adalah ekonomi rakyat atau kerakyatan atas dasar keyakinan bahwa hanya sistim perekonomian inilah yang menjamin rakyat makin sejahtera. Pembangunan ekonomi dalam paradigma lama yang terlampau menekankan pertumbuhan dengan tulang punggung konglomerasi ternyata justru membawa Negara dan bangsa Indonesia terjerembab kedalam krisis ekonomi yang sangat parah. Konglomerasi ternyata semu dan sangat rapuh terhadap goncangan ekonomi global. Dalam konteks ini, maka paradigma ekonomi kerakyatan justru memiliki potensi yang sangat kuat bagi penguatan fundamental

Dengan visi ekonomi kerakyatan ini, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi akan dikembangkan dan diperkuat sebagai pilar utama perekonomian nasional. Partai GOLKAR menginginkan dimasa depan usaha menengah, kecil dan koperasi menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat dalam pengertian yang sebenarnya. Tanpa upaya-upaya pemberdayaan rakyat, maka tujuan menciptakan masyarakat madani akan semakin jauh dari gapaian kita. Untuk itu sejalan dan searah dengan visi menciptakan kesejahteraan rakyat, perhatian terhadap upaya penguatan usaha menengah, kecil dan koperasi menjadi prioritas yang paling diutamakan.

Di bidang sosial budaya, Partai GOLKAR mecita-citakan penguatan budaya bangsa yang mampu melahirkan bangsa yang kuat, yakni bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau keterampilan, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin sosial yang tangguh dan memiliki etika yang kuat. Untuk menuju terciptanya bangsa yang kuat semacam itu, maka perlu dikembangkan suasana dan iklim yang mendukung bagi berkembangannya budaya ilmu (etos intelektualisme), budaya kerja (etos kerja), budaya disiplin, dan budaya hidup etis dan religius dikalangan masyarakat.

Partai GOLKAR memandang kerukunan sebagai basis bagi integrasi bangsa. Untuk itu, maka kehidupan sosial budaya yang berkeadilan dan

kelompok, antara kota-desa, antara jawa-luar jawa, dan antar pusat-daerah, menjadi agenda penting yang harus dipentingkan. Demikian juga halnya pengembangan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama menjadi kepedulian Partai GOLKAR.

Dengan visi ini pula Partai GOLKAR hendak mengembangkan pola hubungan sosial yang lebih harmonis dan dilandasi oleh semangat persamaan manusia. Pandangan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap suatu kelompok tertentu harus dihapuskan dari segenap masyarakat kita, dan diganti dengan pandangan yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan dan persaudaraan sejati antar warga Negara.

4. Misi

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni:

- a. Menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera, adil dan

makmur, menegakkan supremasi hukum, serta terwujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai GOLKAR melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu:

Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

Kedua, melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat

5. Platform

Platform yang dimaksud disini adalah landasan tempat berpijak, yaitu wawasan-wawasan yang menjadi acuan dan arah dari mana dan kemana perjuangan Partai GOLKAR hendak menuju. Platform merupakan sikap

yang merupakan kristalisasi dari pemahaman, pengalaman dan

kesadaran historis Partai GOLKAR dalam menyertai bangsa membangun masa depan.

Partai GOLKAR berpijak pada landasan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari pijakan ini maka Partai GOLKAR bewawasan kebangsaan, yaitu suatu wawasan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan menyatu.

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang mengatasi golongan dan kelompok baik golongan atau kelompok atas dasar agama, suku, etnis, maupun budaya. Kemajemukan atau pluralisme tidak dipandang sebagai kelemahan atau beban, melainkan justru sebagai potensi atau kekuatan yang harus dihimpun secara sinergis dan dikembangkannya sehingga menjadi kekuatan nasional yang kuat dan besar. Kemajemukan bagi Partai GOLKAR adalah anugerah Tuhan yang karena itu bersifat given. Kemajemukan inilah yang selama ini justru telah membentuk mozaik keindonesiaan yang sangat indah dan mempesona sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Dengan platform ini maka Partai GOLKAR terbuka bagi semua golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan Partai GOLKAR diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan anggota maupun dalam rekrutmen kader untuk kepengurusan dan penempatan pada posisi-posisi politik

Partai GOLKAR mengembangkan wawasan kemajemukan yang inklusif yang mendorong dinamika dan persaingan yang sehat serta berorientasi pada kemajuan serta senantiasa siap berkompetisi secara sehat. Perwujudan dari wawasan kebangsaan Partai GOLKAR yang paripurna ini adalah sikap keterbukaan dan kemajemukan. Partai GOLKAR berpijak pada wawasan keterbukaan (inklusif) yang menampung kemajemukan (pluralis) karena hadirnya kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.

Berdasarkan wawasan ini pula Partai GOLKAR bersifat nondiskriminatif dan nonsektarian baik atas dasar perbedaan suku atau etnis, agama, bahasa, budaya, maupun aliran. Partai GOLKAR menolak segala bentuk eksklusifisme baik atas dasar primordialisme maupun kepentingan yang sempit lainnya. Sikap-sikap tersebut terakhir ini tidak sejalan dengan wawasan kemajemukan dan keterbukaan.

Hadirnya kesadaran bahwa kemajemukan merupakan ciri ke-Indonesiaan telah mengokohkan dan mengukuhkan tekad Partai GOLKAR untuk tetap menjadi "Partai politik yang paling Indonesia" yang menjadi "miniatur Indonesia", dimana semua golongan akan merasa kerasan (at home) berada di dalamnya. Dalam rangka itulah, maka Partai GOLKAR memantapkan platform-nya sebagai Partai yang nonaliran atau nonsektarian. Dengan prinsip ini poliitik Partai GOLKAR bukanlah politik aliran atau sektarian.

Partai GOLKAR menjunjung tinggi ajaran agama yang dalam gerak langkahnya senantiasa mendasarkan pada nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan ajaran agama. Etika dan moralitas adalah saripati dari ajaran agama dan buah dari keberagaman itu sendiri. Bagi Partai GOLKAR agama menduduki posisi yang sangat penting dan harus diutamakan. Dengan demikian seluruh langkah perjuangan senantiasa dilandasi nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan agama.

Perpaduan antara kedua wawasan yang terakhir –wawasan kebangsaan dan keagamaan- menjadikan Partai GOLKAR sebagai Partai kebangsaan yang menjunjung tinggi ajaran agama-agama. Dengan menjunjung tinggi ajaran agama, Partai GOLKAR tidak berarti sependapat dengan kecenderungan formalisasi dan apalagi politisasi agama. Partai GOLKAR menghindarkan kecenderungan memanipulasi simbol-simbol agama sebagai alat politik untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang berdimensi jangka pendek. Partai GOLKAR adalah Partai yang demokratis yang memiliki komitmen pada demokrasi. Dalam masyarakat yang demokratis dan terbuka maka hanya Partai GOLKAR yang demokratis dan terbuka pula yang akan mendapatkan dukungan rakyat. Dengan kata lain, Partai GOLKAR hanya akan bertahan dan berjaya, jika dalam tubuh organisasinya sendiri tegak kehidupan yang demokratis, dan berjuang untuk demokrasi.

Dalam rangka demokratisasi inilah, Partai GOLKAR mereformasi dirinya, sehingga melahirkan Partai GOLKAR yang demokratis yang

menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tangan anggota. Ini semua tercermin dalam proses pengambilan keputusan di semua eselon kepemimpinan yang berlangsung secara demokratis dan dari bawah sebagai manifestasi ditegakkannya prinsip kedaulatan di tangan anggota. Partai GOLKAR adalah Partai Moderat yang senantiasa mengambil posisi tengah dan menempuh garis moderasi. Partai GOLKAR tidak akan pernah bersikap ekstrim, baik dulu, kini, maupun mendatang. Sebagai Partai moderat Partai GOLKAR akan tetap konsisten mengembangkan wawasan tengahan dan keseimbangan. Sikap tengahan atau moderat akan menghindarkan Partai GOLKAR dari kemungkinan terjebak pada pilihan-pilihan yang bersifat pemutlakan nilai.

Garis moderasi yang dikembangkan Partai GOLKAR mengandung arti bahwa ia senantiasa mewujudkan keseimbangan dari tarik menarik berbagai kepentingan, dan sebaliknya berupaya untuk mengakomodasi dan mengharmonisasikannya. Dengan demikian, Partai GOLKAR senantiasa berada pada posisi tengahan (median position) dan menjadi kekuatan penengah (mediating and moderating force) di antara semua kelompok potensi bangsa. Partai GOLKAR mengembangkan prinsip nonsektarian dan antisektarianisme, dan karena itu juga nondiskriminasi dan antidiskriminasi.

Pilihan terhadap sikap moderat ini bukan hanya berkaitan erat dengan platform terbuka dan majemuk yang sebelumnya kita bicarakan,

melainkan jauh lebih mendasar, yaitu karena hadirnya kesadaran akan kebenaran ajaran bahwa sebaik-baik perkara adalah yang tengah.

Selanjutnya, Partai GOLKAR mengutamakan pembangunan hukum untuk keadilan dan tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kerangka ini, maka harus diupayakan tegaknya supremasi hukum karena Indonesia adalah Negara hukum. Lebih daripada itu, supremasi hukum harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum. Partai GOLKAR memandang bahwa reformasi hukum tidak terbatas pada penyempurnaan sarana dan prasarana, materi dan aparatur hukum, tetapi juga pembangunan budaya hukum. Penegakan dan pemajuan HAM merupakan unsur penting dalam penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam rangka penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan pula Partai GOLKAR memandang peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan nasional kita yang utama. Perjuangan politik Partai GOLKAR bermuara pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Dalam kaitan ini Partai GOLKAR memandang politik sebagai instrumen dan manajemen untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, adil dan makmur. Peningkatan kesejahteraan itu diwujudkan dalam bentuk antara lain peningkatan taraf hidup dan kecerdasan rakyat. Dengan sikap ini, maka Partai GOLKAR mempertegas keberpihakannya kepada rakyat.

D. MODAL PERJUANGAN

Sebagai Partai modern Partai GOLKAR memiliki sejumlah potensi atau kekuatan yang dapat dijadikan modal perjuangan dalam rangka merealisasikan doktrin, visi, misi, platform, dan pokok-pokok program perjuangannya.

Pertama, potensi historis. Partai GOLKAR telah berusia lebih dari tiga setengah dasawarsa yang didukung oleh kekuatan-kekuatan masyarakat dari seluruh lapisan. Partai GOLKAR memiliki pengalaman panjang dalam menyertai perjalanan bangsa baik di bidang pemerintahan, legislatif, maupun yudikatif. Serangkaian pengalaman panjang ini merupakan potensi historis yang luar biasa besar.

Kedua, Partai GOLKAR memiliki infrastruktur yang sangat kuat yang masih terpelihara dengan baik. Struktur organisasi mulai dari pusat sampai ke desa/kelurahan berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing dalam satu kesatuan manajemen organisasi yang modern. Hubungan Partai GOLKAR dengan Orsosmasinal dan Orsinalmas, juga dengan organisasi-organisasi yang mendirikan dan didirikannya berjalan secara horizontal dan fungsional dan saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan yang setara.

Ketiga, Partai GOLKAR memiliki sumber daya manusia yang relatif berpengalaman, unggul dan lengkap. Kader-kader Partai GOLKAR tersebar dan hidup di tengah tengah masyarakat dan selalu tanggap terhadap aspirasi

Keempat, Partai GOLKAR adalah Partai yang solid yang terbukti selalu dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis untuk berjuang membangun kehidupan bangsa yang bersatu dan kuat.

Kelima, Partai GOLKAR adalah Partai yang mengakar dan responsif, karena merupakan Partai politik yang di dalamnya para anggota dan kader-kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan asas prestasi. Sebagai Partai yang didirikan oleh kelompok-kelompok riil dalam masyarakat Partai GOLKAR tumbuh dan berkembang dari rakyat dan didukung oleh rakyat. Partai GOLKAR juga Partai yang responsif, yakni senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi, tuntutan, dan harapan rakyat, serta konsisten untuk memperjuangkannya sehingga menjadi keputusan politik yang bersifat publik yang menguntungkan seluruh masyarakat.

Potensi-potensi tersebut adalah merupakan modal perjuangan yang sangat besar yang harus diaktualisasikan oleh segenap kader untuk mewujudkan doktrin, visi, misi, platform, dan pokok-pokok perjuangan sebagaimana dipaparkan di atas.

E. POKOK - POKOK KEBIJAKAN PARTAI GOLKAR

Dalam rangka mengaktualisasikan platform tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partai GOLKAR bukan hanya mengembangkan wawasan kebangsaan atau nasionalisme semata, melainkan juga mengutamakan upaya mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, keadilan, dan kesetaraan politik, hukum, sosial dan budaya bagi semua

daerah. Perwujudan keadilan dan pemerataan adalah bagian utama dari program perjuangan Partai GOLKAR untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partai GOLKAR akan terus berjuang untuk memberdayakan masyarakat di segala bidang, antara lain :

1. menghormati dan menghargai upaya-upaya pelestarian budaya lokal, mendorong otonomi daerah secara nyata;
2. dilaksanakannya perimbangan keuangan pusat dan daerah;
3. mengatasi segala bentuk konflik horizontal dan vertikal guna menciptakan perdamaian dan rasa aman didalam masyarakat dengan mengatasi segala bentuk gerakan yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memantapkan wawasan kebangsaan maka partai GOLKAR berjuang untuk memperkokoh segenap potensi bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, yang dilakukan oleh partai GOLKAR adalah :

1. memelopori segala upaya penguatan persatuan dan kesatuan
2. membangun citra bangsa yang positif dimata internasional
3. mencegah berkembangnya nasionalisme sempit.

Dalam rangka merealisasikan platform sebagai partai terbuka dan majemuk Partai GOLKAR berjuang untuk mengembangkan dan membudayakan wawasan keterbukaan dan kemajemukan dalam tubuh partai. Partai GOLKAR juga memandang kemajemukan bangsa sebagai mozaik ke-

Indonesi-an yang justru yang memperkokoh integrasi bangsa. Dalam kaitan ini pula maka upaya untuk memperkokoh keberadaan partai GOLKAR sebagai partai kebangsaan terus ditingkatkan.

Dalam rangka mengembangkan demokrasi baik secara struktural maupun kultural maka partai GOLKAR melakukan:

1. berjuang untuk terciptanya sistem dan format politik yang didalamnya berjalan mekanisme kontrol dan keseimbangan (*chek and balances*);
2. mendorong terbukanya ruang partisipasi politik;
3. memberdaakan lembaga-lembaga demokrasi;
4. membangun kehidupan pers yang bebas dan bertanggungjawab, melaksanakan pendidikan politik bagi rakyat;
5. serta mendorong partisipasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Sebagai partai yang berwawasan kesejahteraan rakyat maka partai GOLKAR :

1. berjuang untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, yakni sistem ekonomi yang berpihak kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi tanpa menafikkan tumbuhnya sistem ekonomi konglomerasi yang tidak monopolistik;
2. mengusahakan ketersediaan bahan kebutuhan pokok rakyat dengan harga yang serba terjangkau;
3. mengurangi pengangguran dengan perluasan lapangan kerja;
4. memperjuangkan upah kerja berdasarkan standar kebutuhan hidup layak (KHL) dan jaminan kerja;

5. serta meningkatkan akses ekonomi rakyat.

Untuk menciptakan supremasi hukum, keadilan dan tegaknya HAM maka Partai GOLKAR bertekad memberdayakan lembaga-lembaga peradilan dan menjadikannya sebagai institusi yang bersih, berwibawadan bermartabat. Mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, serta terus memperbaharui produk-produk hukum yang bertentangan dengan demokrasi, Hak Azasi Manusia dan rasa keadilan masyarakat.

Sebagai partai yang menjunjung tinggi ajaran agama dan memegang teguh etika dan moralitas, Partai GOLKAR dengan kesadaran penuh berusaha untuk mendorong upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Partai GOLKAR berjuang untuk menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, serta terus membangun karakter bangsa berdasarkan ajaran agama.

Partai GOLKAR mendorong pengembangan kehidupan beragama. Pengembangan kehidupan beragama diarahkan pada terciptanya kesetaraan kehidupan beragama baik secara lahiriah maupun batiniyah, sekaligus terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama. Sebagai partai yang menjunjung tinggi ajaran beragama, partai GOLKAR selalu mengajak umat beragama untuk menghindari diri dari kecenderungan politisi agama, yakni menjadikan simbol-simbol keagamaan sebagai alat untuk tujuan-tujuan politik.

Begitu halnya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan

yaitu kebijakan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR kedalam dan kebijakan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR keluar.

1. Kebijakan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR kedalam :

- a. Memantapkan mekanisme dan pelaksanaan Tata Kerja Dewan Pimpinan Partai guna mewujudkan intensitas dan optimalisasi pelaksanaan program dan kebijakan partai.
- b. Memantapkan dan dinamisasi pelaksanaan tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR sebagai eksekutif tertinggi organisasi dalam mengantisipasi berbagai perkembangan yang terkait dan berpengaruh terhadap eksistensi Partai GOLKAR.
- c. Mendorong, memantapkan dan meningkatkan kinerja Dewan Pimpinan Partai GOLKAR di pusat dan daerah beserta seluruh jajarannya guna menjadikan partai yang modern dan efektif bagi anggota dan masyarakat.
- d. Meningkatkan aktifitas penataan keanggotaan dan kaderisasi partai melalui program inventarisasi kader dan pengkaderan.
- e. Mengembangkan komunikasi insentif di daerah melalui berbagai kunjungan kerja.

2. Kebijakan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR keluar:

- a. Mengembangkan dan mengintensifkan program kerja kemasyarakatan yang dapat membangun citra positif partai.
- b. Membangun hubungan kerjasama yang konstruktif dengan pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan yang

berorientasi pada : kentingan rakyat (sebagai partai pendukung pemerintah).

- c. Meningkatkan peran dan partisipasi kader dalam pelaksanaan PILKADA bagi kemenangan Kepala Daerah yang dicalonkan oleh partai GOLKAR.
- d. Membangun opini positif bagi kepentingan partai melalui berbagai media penerbitan.

3. Kebijakan Melalui Fraksi Partai GOLKAR :

- a. Memberikan pengarahan tentang kebijaksanaan DPP Partai GOLKAR terhadap berbagai masalah-masalah teraktual.
- b. Mendorong dan mengarahkan hal-hal yang harus diperjuangkan Fraksi Partai GOLKAR di DPR-RI, terutama dalam upaya menyatukan pandangan terhadap berbagai masalah aktual yang menuntut kegiatan lintas fraksi dan atau lintas partai.
- c. Memberikan arahan kepada Fraksi Partai GOLKAR dalam optimalisasi peran dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan.
- d. Melaksanakan kordinasi intensif secara berkala dan sewaktu-waktu dalam pelaksanaan tugas Fraksi Partai GOLKAR sebagai ~~kepanitiaan kebijakan Partai GOLKAR di DPR~~

F. RENCANA STRATEGIS PEMENANGAN PEMILU

Sukses Pemilu 2009

Reliabilitas politik pemilu 2004 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai GOLKAR meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan Pemilu 1999.

Menghadapi Pemilu 2009 ternyata jauh lebih besar mengingat tingkat kesadaran politik masyarakat juga semakin meningkat. Partai politik yang melakukan kerja-kerja politik hanya menjelang pemilu saja, tentu tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat.

Tuntutan masyarakat terhadap partai politik jauh lebih besar, yakni kerja-kerja riil yang mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat. Partai harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, karena tujuan berdirinya Partai GOLKAR identik dengan tujuan negara, yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kondisi tersebut harus direspon secara positif oleh Partai GOLKAR jika masih menginginkan dukungan dan kepercayaan masyarakat.

Sebagai partai yang responsif dan modern, partai GOLKAR harus merespon dan turut serta berupaya memberikan solusi bagi problem-problem kebangsaan Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa semenjak krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak akhir tahun 1997, sampai saat ini masalah kemiskinan dan pengangguran masih juga belum mampu secara

Partai GOLKAR sebagai bagian kekuatan bangsa Indonesia yang sekaligus memposisikan diri sebagai partai yang mendukung pemerintah secara kritis, objektif dan proporsional, harus mampu memahami permasalahan yang akan muncul, untuk kemudian melakukan antisipasi dan mengelola permasalahan, tantangan, dan kecenderungan baru itu berdasarkan strategi yang dirumuskan secara komprehensif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

Dalam upaya menghadapi Pemilu 2009, Partai GOLKAR mempersiapkan Rencana Strategis dan Rencana Operasional, yang meliputi upaya Partai GOLKAR dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), kemenangan pemilu Legislatif 2009 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009, disusun atas dasar pemahaman dan analisis yang kritis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau yang biasa disebut dengan perkiraan keadaan (KIRKA).

KIRKA tersebut akan selalu berubah (dinamis) sesuai dengan perkembangan keadaan itu sendiri, yang menyentuh simpul-simpul masyarakat dan kantong-kantong suara di masyarakat pula, sehingga perlu direncanakan pola pikir dan pola tindak untuk mencapai sasaran.

Disamping itu kondisi objektif partai-partai di Indonesia saat ini harus menjadi kajian dan perhatian bagi partai GOLKAR dalam rangka menetapkan strategi kemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serta Pemilu Presiden.

Rencana Strategis Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Tujuan, Sasaran, Target, Pokok Strategi dan Tahapan

a. Tujuan dari rencana Strategis adalah :

- 1) Tersusunnya pedoman strategi yang menjadi acuan bagi partai GOLKAR dalam upaya mewujudkan Tri sukses Partai GOLKAR.
- 2) Tersusunnya pedoman langkah-langkah strategis dan tahapan dalam upaya memenangkan pilkada dan Pemilu.

b. Sasaran dari Rencana Strategis adalah terwujudnya Tri sukses Partai Golkar, meliputi :

1) Sukses Konsolidasi dan Pengembangan Partai :

a) Konsolidasi Idiil, untuk memperkokoh kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Konsolidasi wawasan, untuk memantapkan wawasan, untuk memantapkan wawasan kebangsaan dalam memenangkan persaingan global.

c) Sukses pemilu Legislatif, untuk membentuk kekuatan yang berpengaruh di Parlemen dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat guna tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan.

d) Sukses Pemilihan Presiden untuk menjamin terciptanya pemerintahan yang kredibel, berkemampuan, demokratis dalam

rangka meraih kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan.

c. Target dari Rencana Strategis adalah :

- 1) Sukses Pilkada yaitu terpilihnya pasangan Kepala atau Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai GOLKAR, atau gabungan Partai GOLKAR dengan hasil sekurang-kurangnya 60%.
- 2) Sukses Pemilu Legislatif, adalah tercapainya raihan perolehan suara atau perolehan kursi di lembaga legislatif secara nasional lebih besar dari perolehan pada Pemilu sebelumnya.
- 3) Sukses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai GOLKAR dengan Partai lainnya.

d. Pokok Strategi dan Rencana Strategi adalah :

- 1) Pemantapan Kaderisasi, untuk membentuk kader yang berkemampuan, militan, dan menjadi panutan serta mendayagunakan kader seoptimal mungkin dalam upaya mendukung Sukses Pemilu dalam rangka mencapai tujuan partai GOLKAR.
- 2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, dengan titik berat upaya memperluas kesempatan kerja sebagai perwujudan doktrin karya kebajikan, sehingga partai GOLKAR dipercaya memfaktnya sebagi

- 3) Perkuatan basis daerah, dengan mendorong upaya dengan memberikan otoritas yang lebih besar kepada pimpinan daerah, memperkuat kemampuan dan kemandirian daerah, serta membentuk basis-basis simpatsan partai GOLKAR di tingkat desa atau kelurahan.

e. Tahapan dari Rencana Strategis adalah :

- 1) Tahap Persiapan

- a) Titik berat yaitu, kegiatan konsolidasi anggota, kelembagaan kaderisasi bagi penyiapan infra struktur partai untuk upaya kemenangan pemilu.

- b) Sasannya adalah, terbentuknya basis konstituen partai.

- 2) Tahap Pemantapan

- a) Titik berat yaitu, kegiatan penggalangan teritorial, fungsional yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan bagi simpatsan atau konstituen partai.

- b) Sarannya adalah terbentuknya basis konstituen partai.

- 3) Tahap Pelaksanaan

- a) Titik berat yaitu kegiatan penggalangan teritorial, fungsional dan pembentukan opini bagi partai GOLKAR sebagai partai yang paling bermanfaat bagi rakyat serta kegiatan pelaksanaan Pemilu.

- b) Sasannya adalah pada kemenangan Pemilu

2. Rencana Operasional Pemenangan Pemilu

Dalam rangka upaya pemenangan Pemilu, maka ditetapkanlah Rencana Operasional sebagai berikut :

- 1) **Pemantapan pelaksanaan konsolidasi yang meliputi : konsolidasi Ideil, Konsolidasi Wawasan dan Konsolidasi Organisasi, diarahkan pada pemantapan kelembagaan , baik kelembagaan Vertikal maupun kelembagaan horizontal di semua tingkatan juga mencakup konsolidasi kader, keanggotaan, loyalitas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas Organisasi, serta mengoptimalkan peran anggota Fraksi Partai Golkar di parlemen secara kritis, objektif dan proporsional .**
- 2) **Peningkatan upaya penggalangan, baik dalam bentuk penggalangan teritorial maupun fungsional berupa pelaksanaan program riil yang menyentuh pada kepentingan rakyat yang dilaksanakan oleh kader maupun fungsionaris partai, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan kerja bagi rakyat dan simpatisan partai.**
- 3) **Perkuat basis daerah melalui peningkatan peran kepemimpinan kader-kader partai yang menduduki jabatan baik di infra maupun supra struktur. Demikian pula meningkatkan intensitas komunikasi**

dengan tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga formal dan informal. Mengembangkan dan melaksanakan berbagai

Sukses Pemilu 2014

- 1. Terwujudnya eksistensi Partai GOKLAR sebagai organisasi partai politik yang mandiri, demokrasi, berakar, egaliter, solid dan modern serta senantiasa berorientasi kepada karya dan kekaryaan.**
- 2. Berhasilnya Partai GOLKAR dalam rangka memperjuangkan tetap terjadinya Keistimewaan Yogyakarta dan memperjuangkan kadernya menduduki jabatan-jabatan politik di daerah Kabupaten atau kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**
- 3. Berhasilnya Partai GOLKAR memenangkan kembali dalam legislatif 2014 di semua tingkatan dalam rangka meningkatkan fungsi dan perannya di lembaga-lembaga perwakilan sebagai wahana memperjuangkan kepentingan rakyat.**
- 4. Berhasilnya Partai GOLKAR memenangkan Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden 2014**
- 5. Pengkajian dan perumusan paket Undang-Undang Politik untuk memantapkan strategi kemenangan Pemilu**

G. ARTI LAMBANG PARTAI GOLKAR



1. Penjelasan Tanda Gambar

- a. Berpengang perisai segilima yaitu melambangkan bahwa Partai GOLKAR tetap berpijak dengan teguh serta dijiwai pancasila yang senantiasa menjadi pelindung, pengamal dan dengan keuletan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
- b. Gambar Pohon Beringin dengan akar angin (sulur) sebanyak 8 (delapan) buah adalah melambangkan pengayoman dan wicaksana (wisdom).
- c. Kapas dengan kelopak bunga berjumlah 17 (tujuh belas) kelopak yang melambangkan kesejahteraan sandang.
- d. Padi dengan tangkai dan butir-butir sejumlah 45 (empat puluh lima) biji yang melambangkan kemakmuran pangan.
- e. Simpul tangkai padi dan kapas berjumlah 8 (delapan) buah yang melambangkan persatuan.

f. Makna Gambar Pita adalah pengikat guna membawa persatuan dan memelihara Golongan Karya di dalam melaksanakan tugasnya dalam mengabdikan pada nusa dan bangsa, dan tidak lupa menyembah Tuhan Yang Maha Esa.

2. Makna Tanda Gambar

Dari keseluruhan makna tanda gambar partai Golongan karya (GOLKAR) yaitu pengayoman yang teguh serta tangguh menuju kepada kesejahteraan atau kemakmuran, dijiwai semangat persatuan yang semuanya itu mengungkapkan bahwa GOLKAR berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Lukisan kapas, padi, dan simpul dari jumlah masing-masing memperingatkan pada saat bersejarah bangsa Indonesia yaitu 17 Agustus 1945.

3. Makna Warna

Warna hijau melambangkan sifat kesuburan, kesegaran, dan kepercayaan. Warna kuning melambangkan sifat keluhuran yang bijaksana dan cendikia. Warna hitam melambangkan sikap kemantapan, keteguhan dan kekekalan. Serta warna putih yang melambangkan sifat kesucian yang bersih tanpa pamrih.

H. STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI D. I. YOGYAKARTA

1. Struktural

Struktur organisasi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengaju pada JUKLAK Dewan Pertimbangan Partai, partai GOLKAR setelah disesuaikan dengan kondisi daerah demi tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Maka struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi :

a. Dewan Pertimbangan Partai, terdiri atas :

- 1) Seorang Ketua
- 2) Seorang Wakil Ketua
- 3) Tujuh Orang Anggota

b. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR, terdiri dari :

1) Pengurus Harian :

- a) Seorang Ketua dengandibantu oleh Ketua harian (jika Diperlukan) dan 14 Waki Ketua.
- b) Seorang Sekretaris, dengan dibantu oleh 14 Wakil Sekretaris.
- c) Seorang Bendahara, dengan dibentu oleh 2 Wakil Bendahara

2) Pengurus Biro, terdiri dari :

- a) **Biro Organisasi Dan Hubungan Kelembagaan**
- b) **Biro Kaderisasi Dan Keanggotaan**
- c) **Biro Pemenangan Pemilu**
- d) **Biro Pengabdian Masyarakat Dan Penanggulangan Bencana**
- e) **Biro Hukum dan HAM**
- f) **Biro Tani Dan Nelayan**
- g) **Biro Tenaga Kerja, Koperasi Dan UMKM**
- h) **Biro Pemuda, Mahasiswa, Pelajar Dan Olahraga**
Pada biro ini yang akan menjadi Pengurus DPD Provinsi dari unsur Pemuda Sekurang-kurangnya 50%
- i) **Biro Pendidikan Dan Pelatihan**
- j) **Biro Pemberdayaan Perempuan**
Dari Unsur Perempuan Sekurang-kurangnya 30%
- k) **Biro Keagamaan**
- l) **Biro Seni, Budaya Dan Pariwisata**
- m) **Biro Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Masyarakat**

2. Badan dan Lembaga

Perjalanan Partai GOLKAR ke depan membutuhkan pola kerja baru yang mampu membangun akses jaringan kerjasama dengan

berbagai pihak sehingga integritas kerja politik yang sinergis antara kader struktural dan fungsional partai sangat diperlukan dalam mengelola manajemen program kerja politik partai kedepan.

Mengingat banyaknya jumlah kader dan terbatasnya jumlah personalia yang dibutuhkan untuk duduk dalam struktural kepengurusan partai maka melalui MUSDA ke VII Partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta perlu juga mempertimbangkan memberi mandat kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta terpilih untuk membentuk Badan dan Lembaga Partai GOLKAR sesuai kebutuhan untuk lebih mengefektifkan kerja politik partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta kedepan secara lebih fokus, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan dan target

Tabel 2.1

Komposisi Dan Personalia Dewan Pertimbangan Daerah

Partai Golkar Provinsi D. I. Yogyakarta Masa Bakti 2009-2015⁶⁴

No.	Nama	Jabatan
1.	Adi Sutrisno, SE	Ketua
2.	HM. Sudarno, S. IP	Wakil Ketua
3.	KPH. H. Tjondrokusumo	Wakil Ketua
4.	Drs. H. Najib Saleh DB	Wakil Ketua
5.	Drs. Sunarto	Sekretaris
6.	M. Habib Bari	Wakil Sekretaris
7.	Hari Purnomo, Bsc	Wakil Sekretaris
8.	Drs. Pariata Westra	Anggota
9.	M. Suhud , SH	Anggota
10.	Drs. ST Mulyadi	Anggota
11.	Drs. H. Sujatmo	Anggota
12.	Dra. Arini Westra	Anggota
13.	Dr. Sri Winih	Anggota
14.	Bambang Raharjo, SH	Anggota
15.	Drs. Bambang Haryanto, MM	Anggota
16.	E. Sri Sayekti	Anggota
17.	Sri Hastuti Wiyono, Bsc	Anggota

⁶⁴ Arsip DPD Partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta Tahun 2010

Tabel 2.2**Pengurus Harian Partai Golkar****Provinsi D. I. Yogyakarta Masa Bakti 2009-2015⁶⁵**

No	NAMA	NPAPG	JABATAN
1.	Drs. Gandung Pardiman, MM	12040900001	Ketua
2.	w. FX. Soedardi, SE	12010300013	Ketua Harian
	WAKIL-WAKIL KETUA		
3.	Rahmad Pribadi, SE		Pemenangan Pemilu Wilayah I
4.	George BL. Panggabean	12050000011	Pemenangan Pemilu Wilayah II
5.	H. Deddy Suwardi, SR. SH	12050000019	Korbid Organisasi dan Hubungan Kelembagaan
6.	Janu Ismadi, SE	12050000020	Korbid Kaderisasi keanggotaan
7.	Setya Sudjati SS. BSc	12050000073	Korbid Pengabdian Masyarakat dan penanggulangan bencana
8.	HM. Ikbal, SH	12020500018	Korbid Hukum dan HAM
9.	Subadi	12050000018	Korbid Tani dan Nelayan
10.	R. Baroto Hartoto	11030060500	Korbid NAKER, Koperasi dan UMKM
11.	Drs. Adjad Suharsono	11030060482	Korbid Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Olahraga
12.	Drs. Jhon Serang Keban	12011200020	Korbid Pendidikan dan Pelatihan
13.	Hj. Ranny W. Rumintarto, SE. MM	12011300012	Korbid Pemberdayaan Perempuan
14.	Drs. H. Ahmad Subangi	1203000002	Korbid Keagamaan
15.	Drs. Widyohari Murdiyanto, M. Si	12021202861	Korbid Seni Budaya dan Pariwisata

16.	Drs. Geyol Sigiyanto, Msc	12050000107	Korbid Lingkungan Hidup dan Kesehatan masyarakat
17.	Drs. Julianto, Msi		Korbid informasi dan komunikasi
18.	Drs. Suhartoto, ST	1201800104	Sekretaris
WAKIL-WAKIL SEKRETARIS			
19.	Heroe, TH	12011000028	Pemenangan Pemilu Wilayah I
20.	Ninuk Dian Suratri, SH	12050002662	Pemenangan Pemilu Wilayah II
21.	Edi Prayitno, SH	12010901132	Korbid Organisasi dan Hubungan Kelembagaan
22.	Drs. Agus Mulyono, MM	12010800034	Korbid Kaderisasi Dan Keangotaan
23.	Slamet Bgya, S. IP., SE	12021500010	Korbid Pengabdian Masyarakat Dan Penanggulangan Bencana
24.	Bambang Wahyu Hidayat, SH	12911300026	Korbid Hukum dan HAM
25.	B. Eddy Koestantyo, SE		Korbid Tani Dan Nelayan
No	NAMA	NPAPG	JABATAN
26.	Drs. R. Bambang Sri Budoyo	12050002911	Korbid Naker, Koperasi dan UMKM
27.	HM. Roeseno, SH., MM	12040000114	Korbid Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Olahraga
28.	Ir. Edi Yanto Abdullah	12010300022	Korbid Pendidikan dan Pelatihan
29.	Florentina Diani Anindiati	12050002947	Korbid Pemberdayaan Perempuan
30.	Drs. H. Joko Jumeno	12020500022	Korbid Keagamaan
31.	Drs. Totok Sudarwoto	12050005764	Korbid Seni Budaya dan Pariwisata
32.	R. Ngt. Heny Tri Widayati, S.Pd	12020500019	Korbid Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat

33.	Awiek Roospariyitno	12019700027	Korbid Informasi dan Komunikasi
34.	Drs. H. Haryadi	12010313510	Bendahara
35.	Suhud Iamndoyo, SE	12011302301	Wakil Bendahara
36.	Hj. Fariani S. Hamdani, ST	11010001939	Wakil Bendahara
BIRO-BIRO			
37.	R. Agus Sudiby Katamsi		Pemenangan Pemilu Wilayah I
38.	R. Djoko Widodo, SH	12011200128	Pemenangan Pemilu Wilayah I
39.	Sigit Santosa Pribadi, SH		Pemenangan Pemilu Wilayah II
40.	Gatot Guritno		Pemenangan Pemilu Wilayah II
41.	Drs. R Gunarto		Organisasi dan Hubungan Kelembagaan
42.	Suwimbar		Organisasi dan Hubungan Kelembagaan
43.	Adiyan Prastowo		Organisasi dan Hubungan Kelembagaan
44.	Drs. Fauzandaru		Kaderisasi Dan Keangotaan
45.	Ratna Sari, SE	12010806045	Kaderisasi Dan Keangotaan
46.	Drs. Rambito Budino		Kaderisasi Dan Keangotaan
47.	Dra. Hj. Maskanah Sudarno	12220040001	Pengabdian Masyarakat Dan Penanggulangan Bencana
48.	RM. Zaky Broto Riyanto, SE., MBA	12010703706	Pengabdian Masyarakat Dan Penanggulangan Bencana
49.	Hutabarat, SH		Hukum dan HAM
50.	Listiana Lestari, SH	12050002321	Hukum dan HAM
51.	R. Suhartoyo	12050000016	Tani Dan Nelayan
52.	Rachamadi	12010304438	Tani Dan Nelayan
53.	Victor Wirasakti Hendriawan	12050001885	NAKER, Koperasi dan UMKM
54.	A. R. Maryadi		NAKER, Koperasi dan UMKM

No	NAMA	NPAPG	JABATAN
55.	Karel, SH	12050000022	Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Olahraga
56.	Taruna Wibisana, SH	12011200131	Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Olahraga
57.	Ir. Purnomo Suharintoyo	12050000013	Pendidikan dan Pelatihan
58.	Drs. Habib Muasin, S. Sos. M.Si		Pendidikan dan Pelatihan
59.	M. CH. Tri Erlin Rahayu	12010100758	Pemberdayaan Perempuan
60.	Dra. Inggit Fatimah		Pemberdayaan Perempuan
61.	Hj. Tati Burhan, BA	12050000023	Keagamaan Islam
62.	CH. Ninik P. Nurjaya W.	12010300190	Keagamaan Katolik
63.	Flora nuraraini Harapan		Keagamaan Kristen
64.	Agus Handoko		Keagamaan Hindu atau Budha
65.	Endar Sri Astuti	12020201638	Seni Budaya dan Pariwisata
66.	M. Taslim		Seni Budaya dan Pariwisata
67.	Joko Paryanto		Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat
68.	Ety Erawati, SE	12011204982	Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat
69.	Ir. Imam Suyudi	12020400096	Informasi dan Komunikasi
70.	Arbi Nurzunanto	12010104985	Informasi dan Komunikasi